

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Persaingan global dan serbuan perusahaan tradisional yang cenderung eksploitatif dan imperialisme serta perkembangan perekonomian yang sangat pesat seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan perekonomian berbasis masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Untuk menegakkan dan memperjuangkan ekonomi kerakyatan, lembaga koperasi diyakini merupakan wadah yang paling tepat dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat sudah mulai menyadari manfaat dibentuknya koperasi bagi kehidupan. Jika dilihat koperasi sebagai unit usaha, pengelolaan koperasi harus juga mempunyai kinerja yang baik sebagai pertanggung jawaban kepada seluruh anggotanya yang berkedudukan sebagai pemilik koperasi.

Pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku diantaranya Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), kebijakan, struktur organisasi, peran dan aturan yang memiliki fungsinya masingmasing sesuai dengan jobdesk dari para pengurus, pengawas dan pengelola dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan visi dan misi serta tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki

akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Serta kurangnya perhatian sistem informasi dalam pengembangan diri koperasi untuk mempermudah informasi dan mempermudah pengelolaan koperasi sehingga pengambilan keputusan lebih cepat.

Koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan bersifat kekeluargaan dan sudah melekat dihati masyarakat Indonesia sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk kembali menjadikan koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Koperasi harus mampu meningkatkan kinerjanya melalui penerapan prinsip-prinsip GCG. Walaupun prinsip dasar dari koperasi adalah sukarela akan tetapi koperasi juga harus dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, karena maksud dari sukarela disini adalah bagaimana anggota, pengelola, pengurus dan badan pengawas sama-sama ingin membangun koperasi dan dapat merasakan manfaat dari koperasi itu sendiri. Sehingga koperasi yang terkelola sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Lemahnya penerapan tata kelola didalam perusahaan menjadi pemicu terjadinya skandal pada bisnis perusahaan, dan menyadarkan orang akan perlunya sistem tata kelola yang baik. Mulai saat itu banyak pihak yang berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi sebuah kebutuhan di dalam dunia bisnis yang digunakan sebagai barometer akuntabilitas dari sebuah organisasi bisnis (Dewayanto, 2010). *Good governance* harus selalu menyesuaikan dengan keadaan, perkembangan, serta sistem hukum suatu negara, sehingga praktik Good Governance tiap

Negara berbeda (Wibowo, 2010). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara mampu menjadi tolok ukur kemajuan dari Negara itu sendiri (Krismaya Dewi dan Putri, 2014). Negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik cenderung karena lembaga keuangannya yang juga baik. Sumber pendanaan masyarakat Indonesia berasal dari lembaga keuangan bank dan non bank. Terdapat beberapa lembaga keuangan yang dapat digunakan khususnya masyarakat di Bali, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Perkreditan Desa, dan Koperasi.

Koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng terdapat 31 koperasi yang tersebar di beberapa tempat wilayah kecamatan Buleleng, di antaranya 20 koperasi yang termasuk kategori masih aktif dan 11 koperasi yang sudah non aktif. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang non aktif adalah KSP Sari Kumala, KSP Pagosadata, KSP Darma Yasa Sri Rejeki, KSP Sari Amerta Sari, KSP Sami Liang, KSP Karya Buleleng Bersatu, KSP Ayu Luwih, KSP Mandiri, KSP Bina Insani, KSP Suryanadi, dan KSP Dana Samudra. Kondisi 11 koperasi simpan pinjam yang mengalami non aktif menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan koperasi simpan pinjam. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada organisasi Koperasi Simpan Pinjam (www.balipost.com).

Sampai saat ini koperasi yang sudah melaksanakan RAT tahun buku 2020 telah mencapai 75 persen dari 291 wadah koperasi yang tercatat di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UKM (Disdagperinkop

UKM) Kabupaten Buleleng. Ketentuan batas pelaksanaan RAT hingga tanggal 31 Maret 2021 yang merupakan ketetapan setiap tahunnya. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM (Dagperinkop UKM) Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta, Jumat (26/3/2021) pagi mengatakan bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT berturut-turut selama dua kali akan diberikan sanksi tegas dengan mencabut ijin operasionalnya. “Dan nanti bagi koperasi-koperasi yang menurut record kita mungkin sudah dua kali tidak melakukan RAT, hal ini kita akan berikan perhatian khusus. Perhatian khusus artinya, apakah dia betul-betul melaksanakan kewajiban atau koperasinya barangkali mungkin sudah tidak aktif. Kalau nanti mungkin dua kali RAT, ada dua kemungkinan nanti kita rekomendasikan untuk dia mungkin bisa mengusulkan pembubaran sendiri, atau kita yang mengusulkan pembubaran,” jelasnya. Terkait hal itu pihaknya secara rutin memberikan pembinaan dampingan di lapangan sehingga koperasi bersangkutan bisa melaksanakan RAT. Dengan adanya kendala pandemi Covid-19 ungkap Dewa Made Sudiarta, pihaknya telah memberikan kemudahan dengan pelaksanaan RAT secara virtual.

Good corporate governance diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan koperasi agar memperhatikan tanggung jawabnya mensejahterkan anggota. Untuk dapat menjalankan fungsi serta perannya yang begitu penting untuk perekonomian maka koperasi harus dikelola secara baik agar dapat meningkatkan kinerjanya secara

berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah gencar mensosialisasikan tentang *good corporate governance* pada koperasi kepada masyarakat agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun.

Keberhasilan koperasi dapat dicapai apabila koperasi sudah memiliki pedoman yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan pedoman yang sangat efektif digunakan oleh koperasi untuk meningkatkan daya saing serta akan menciptakan pedoman bagi pengelola koperasi dengan mengelola manajemennya yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* (*stakeholders* di lingkungan koperasi). Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta nilai dari koperasi sendiri dengan memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah (Hindistari dan Putri, 2016). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG (2006:5) prinsip-prinsip *good corporate governance* antara lain : *transparancy* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *indepedency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan). Prinsip GCG dibutuhkan agar tercapainya kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan *stakeholder* (KNKG, 2006:5). *Good corporate governance* juga diharapkan dapat memberi manfaat dan meningkatkan kemampuan kinerja secara finansial

maupun nonfinansial. Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah dijadikan acuan oleh beberapa negara tak terkecuali di Indonesia.

Lembaga keuangan sebagian besar sangat memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Perusahaan akan menghadapi risiko dan tantangan yang semakin sering akan terjadi. Risiko dan tantangan ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan, salah satunya mencapai laba maksimal (Ariestya dan Ardhana, 2016). Manajemen risiko merupakan salah satu upaya dalam praktek berkoperasi untuk memperkecil ruang dan kesempatan para pembobol koperasi. Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional merupakan beberapa risiko yang sering dihadapi institusi perbankan (Darmawi, 2011:16). Koperasi dalam menjalankan operasinya tentu tidak lepas dari berbagai macam risiko. Salah satu risiko yang sering dihadapi koperasi adalah risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kurang berfungsinya proses internal bank, humam eror, kegagalan sistem teknologi, atau akibat permasalahan eksternal (Majid, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah menggunakan rasio Beban Operasioanal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Nurintan, 2016). BOPO yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah dari bank dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan kerugian (Majid, 2015).

Good corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan memiliki hubungan yang kuat (Yahya dan Shukeri, 2014). Penerapan sistem *Good corporate governance* yang baik dapat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan (Bistrova dan Lace, 2012). Nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh variabel *good corporate governance* yang dilakukan dan variabel ini juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Setyawan dan Putri, 2013). Ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Penelitian ini menggunakan ukuran ROA sebagai ukuran kinerja keuangan koperasi. Karena ROA berfokus terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasinya (Sudiyatno dan Suroso, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, koperasi merupakan komponen penting bagi perekonomian di Indonesia. Koperasi merupakan bagian dari sistem pasar yang akan bersaing dalam memberikan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing di dunia perekonomian, koperasi harus menerapkan tata kelola yang baik. Penerapan manajemen risiko dalam koperasi akan mampu membuat bisnis koperasi menjadi sehat dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan dalam bisnis koperasi. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti “**Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng**”. Penelitian ini menggunakan data tahun 2017 – 2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, sesuai berita yang ditemukan yang menyatakan bahwa “terdapat 31 koperasi yang tersebar di Kecamatan Buleleng sebanyak 20 koperasi yang masih aktif dan 11 koperasi non aktif” (www.balipost.com) maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan koperasi belum berlandaskan visi dan misi serta tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- (2) Lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada koperasi simpan pinjam akan dapat menurunkan kinerja keuangannya.
- (3) Pengelolaan koperasi simpan pinjam yang belum efektif dan efisien, adanya keterlambatan RAT yang dapat menyebabkan non aktif dan pencabutan izin.
- (4) Risiko yang dihadapi koperasi simpan pinjam belum dikelola dengan baik sehingga rasio BOPO yang dihasilkan cukup tinggi dapat memperkecil laba yang dihasilkan.
- (5) Kinerja yang diukur melalui rasio ROA, ROA yang rendah menunjukkan kinerja yang buruk sehingga dapat mengakibatkan banyaknya koperasi yang non aktif.

1.3 Pembatasan Masalah

Peningkatan kinerja keuangan sangat mempengaruhi kesinambungan usaha. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya pada :

1. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi simpan pinjam.
2. Manajemen risiko yang diterapkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen risiko secara simultan terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng?
- (2) Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness*) terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng?
- (3) Bagaimana pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen risiko secara simultan terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng.
- (2) Pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness*) terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng.
- (3) Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

(1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat untuk memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik pengaruh dari prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen risiko untuk dapat memperluas wawasan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perbandingan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

(2) Manfaat Praktis

Bagi pihak koperasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan pertimbangan bagi pihak koperasi bahwa tidak hanya prinsip-prinsip koperasi saja yang ada, namun prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan secara bersinambungan dalam mengelola koperasi akan mampu meningkatkan kinerja keuangan koperasi tersebut serta mampu menerapkan manajemen risiko di dalam koperasi. Bagi Perguruan Tinggi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai penerapan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan, bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik



